



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI
KREATIF BIDANG DESAIN FASHION**

JURNAL ILMIAH

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Fihatul Aidiyah, SH
11010111400024**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.MS.LLM

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA INDUSTRI KREATIF BIDANG DESAIN FASHION

JURNAL ILMIAH

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

**Fihatul Aidiyah, SH
11010111400024**

Jurnal ilmiah dengan judul di atas
Telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.MS.LLM

NIP. 194904281974121001

ABSTRAK

fashion merupakan salah satu bidang dalam industri kreatif yang keberadaannya sedang berkembang di Indonesia. Dalam industri kreatif sangat syarat dengan kreativitas dan inovasi. Banyak desainer yang menciptakan desain-desain fashion yang menarik serta diminati banyak kalangan. Atas dasar tersebut telah banyak terjadi penjiplakan pada hasil karya desain fashion yang sedang menjadi trend dalam berbagai macam tindakan yang merugikan penciptanya.

Desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda, misalnya busana. Desain dari sebuah fashion merupakan hasil ide dan kreatifitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan hasil karya fashion di antaranya dilindungi oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain sebagai pencipta hasil karya mempunyai hak eksklusif untuk melarang orang lain menjiplak hasil karyanya.

Pelaksanaan perlindungan terhadap desain fashion masih kurang maksimal. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada dasarnya cukup memberikan perlindungan atas desain fashion. Akan tetapi masih ada kekurangan pada pengaturannya serta masih dibutuhkannya kesadaran dari para pihak untuk mewujudkan tercapainya perlindungan hukum.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak cipta, desain industri, desain fashion.

ABSTRACT

Fashion is one of the creative industries worlds which its presence is growing in Indonesia. In the creative industries which full with creativity and innovation, many designers create interesting fashion designs and interested many people. On that basis,a lot of plagiarism has been going on in the work of fashion design which becoming trend in various actions that harm the creator.

Design is a design pattern which is the basis for making an object, such as clothing. Fashion design is the result of an idea and the creativity of a designer that should be protected and cherished. Legal protection against violations in the relation with the work of fashion is protected by Law No. 19 of 2002 on Copyright and Law No. 31 of 2000 on Industrial Design. Designer as the creator of the work has the exclusive right to prohibit others plagiarizing his or her works.

The implementation of the fashion design protection is still less than the maximum. Law No. 19 of 2002 on Copyright and Law No. 31 of 2000 on Industrial Design basically enough to provide protection on fashion design. However, there are still shortcomings in regulation and still needed awareness of the parties to realize the achievement of legal protection.

Keywords: legal protection, copyright, industrial design, fashion design.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan telah diakui baik dalam tataran nasional, regional, maupun internasional. HKI juga turut mempengaruhi pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta (*contracting state*) WTO telah terikat untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasionalnya sehingga sesuai dengan perjanjian perdagangan tersebut. Lebih jauh lagi Indonesia pun dituntut untuk secara konsisten menegakkan aturan-aturan yang telah disepakatinya itu.

Perkembangan HKI saat ini tidak dapat dipisahkan dari organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang secara resmi menggantikan GATT sejak tanggal 1 januari 1995 berdasar hasil kesepakatan *Uruguay Round* tahun 1994. Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik di forum nasional maupun internasional, dimasukkannya *TRIPs* dalam paket persetujuan WTO pada tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia.¹

Kondisi saat ini terjadi ketidak seimbangan dalam penerapan dan penegakan hukum dalam bidang HKI itu sendiri. Dalam satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak intelektual, namun dalam satu sisi masyarakat kurang memperdulikan sehingga seringkali sebuah karya diklaim pihak lain, yang sebenarnya tidak berhak.

¹ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), Hal: 6

Industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan intelektual (*intellectual property*) menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan hasil studi, Negara Inggris mengelompokkan Industri Kreatifnya kedalam 13 sektor (*Advertising; Architecture; Art & Antiques Markets; Craft; Design; Designer Fashion; Film & Video; Interactive Leisure Software; Music; Performing Arts; Publishing; Software & Computer Services; Television and Radio*).²

Industri yang diyakini memiliki ketahanan atas terjadinya krisis keuangan global ini adalah apa yang dikenal dengan industri kreatif. Membicarakan industri kreatif sangat berhubungan erat dengan perlindungan kekayaan intelektual (KI). Dalam industri kreatif sangat syarat dengan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini dikenal dengan kekayaan intelektual. Mengingat dalam industri kreatif syarat dengan kekayaan intelektual, maka menjadi absolut jika kekayaan intelektual yang dimiliki industri kreatif sebelum dieksploitasi mendapatkan perlindungan dari segi hukum terlebih dahulu.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebuah desain fashion dalam industri kreatif bisa mencakup desain industri dan hak cipta. Pelaku industri kreatif di bidang fashion harus memahami bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut agak tidak bertentangan dengan aktifitasnya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan inilah, kiranya perlu

² <http://arifh.blogdetik.com/industri-kreatif/> diakses Tanggal 5 september 2012, pukul 21:36 WIB

dilakukan penelitian hukum mengenai perlindungan hukum HKI terhadap bidang industri kreatif, secara normatif untuk memberikan satu gambaran yang jelas tentang kondisi dan potensi serta upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum HKI atas hasil desain fashion di bidang industri kreatif.

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

B. HASIL PENELITIAN

2. KAITAN ANTARA DESAIN FASHION TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Desain dari sebuah fashion merupakan hasil ide dan kreatifitas dari seorang desainer yang patut dilindungi dan dihargai. Desain Fashion terutama pada kain batik serta kebaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya yaitu seni batik dan kebaya.

Penciptaan desain dalam fashion patut untuk dilindungi hak ciptanya karena sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang sekarang mencoba

³ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian hukum*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal 35

menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum.

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum berdasarkan penggolongannya menurut jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk melindungi si pencipta. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Pemerintah guna untuk meminimalisir dampak dari adanya penjiplakan, peniruan, serta klaim hasil karya orang lain. Perlindungan preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan hasil karya fashion di antaranya yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Dalam hal perlindungan hak cipta dan Desain Industri dari sebuah desain fashion maka yang dimaksud sebagai perlindungan hukum represif adalah tindakan pasca terjadinya sengketa atau pelanggaran, yaitu upaya hukum setelah terjadinya pelanggaran hak cipta dan desain industri dari desain fashion. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelaku pelanggaran tersebut akan diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain ornamental yang diaplikasikan pada pakaian pada umumnya merupakan ciptaan yang termasuk dalam kategori seni rupa, seni batik atau karya-karya fotografi. Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta, yang termasuk lingkup seni rupa yaitu seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan. Menurut Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Sementara kolase, adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari manik-manik, batu-batuan, kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Dijelaskan pula bahwa seni terapan yang berupa kerajinan tangan, sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal, merupakan suatu Ciptaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pakaian sebagai sebuah barang fungsional (*useful article*), yang juga diproduksi secara industri (dan dalam jumlah masal), tidak dikategorikan sebagai obyek perlindungan hak cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Karenanya perlu diperhatikan bahwa pada saat pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta, spesimen dari ciptaan yang diajukan dalam permohonan adalah berupa blueprint (model/prototype atau sketsa) dari desain yang termasuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas. Misalnya, gambar motif bunga, gambar motif batik atau gambar logo-logo dengan bentuk huruf indah, tanpa menyebut/menyertakan barang di

mana motif tersebut akan diaplikasikan (apakah pada pakaian, wall paper, kertas kado, dan lain sebagainya).

Untuk desain fashion dengan perlindungan hak cipta adalah untuk desain yang tidak diproduksi dalam jumlah massal dan untuk kepentingan industri. Biasanya desain tersebut di ciptakan oleh desainer-desainer independen, bukan desainer dalam bisnis fashion retail. Untuk mendapatkan sebuah perlindungan bagi seorang desainer independen tentulah bukan perkara sulit, karena secara finansial desainer independen mampu dari segi finansial mendaftarkan hasil karya desainnya, dimana biaya registrasi yang cukup mahal. Biaya tersebut cukup sebanding dengan output yang dikeluarkan oleh desainer independent.

Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi agar desain tersebut masuk ke perlindungan hak cipta:

- 1) Merupakan sebuah hasil ide kreativitas dalam bentuk seni

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk desain fashion lebih tepat masuk lapangan seni dimana hasil sebuah desain erat kaitannya dengan seni. Seni batik sebagai salah satu ciptaan dibidang fashion yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta serta kebaya yang termasuk ke dalam kategori benda budaya warisan tradisional yang keberadaannya dilindungi. Untuk desain fashion pada hasil karya desainer belum ada pengaturannya secara khusus di Indonesia, untuk perlindungannya hanya dikaitkan lebih kepada Hak Cipta dan Desain Industri.

- 2) Tidak diproduksi dalam jumlah massal

Hasil karya sebuah desain fashion hanya bisa dilindungi oleh Hak Cipta apabila desain tersebut tidak di ciptakan secara massal, tetapi hanya satu untuk tiap desainnya. Contohnya desain yang diciptakan oleh seorang desainer yang hanya berwujud satu objek saja tanpa diproduksi massal. Ada sisi *limited* dan *eksklusifitas* dalam rancangan desain tersebut. Biasanya desain tersebut diciptakan oleh desainer-desainer independen.

Perlindungan desain fashion dengan desain industri diberlakukan apabila memenuhi unsur-unsur;

1) sebuah karya seni desain yang baru

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 bahwa hak desain industri hanya dapat diberikan kepada desain industri yang baru, artinya disini bahwa dianggap baru apabila sebelumnya belum ada pengungkapan desain tersebut.

Sedangkan untuk suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

2) diproduksi massal

Sebuah desain yang didaftarkan dengan desain industri harus desain yang diproduksi secara massal, contohnya pada desain-desain busana yang dikeluarkan oleh ritel-ritel atau konveksi.

3. FUNGSI PERLINDUNGAN DESAIN FASHION

Dari konsep tentang hukum dan fungsi hukum, ia berpendapat bahwa pembinaan hukum nasional harus diarahkan pada usaha-usaha :⁴

- a. Memperbaharui peraturan-peraturan hukum termasuk penciptaan yang baru dengan menyesuaikan pada tuntutan perkembangan jaman tanpa mengabaikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum sesuai proporsinya masing-masing.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kewajiban para penegak hukum
- d. Membina kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan pada prinsip:⁵

- a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar bila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut

⁴ Johanes Ibrahim dan lindowati Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, (Bandung, Rafika aditama :2003) hal. 55

⁵ Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung : Bina Cipta,1982) Hal 124

dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *tittle*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

Berdasarkan prinsip ini, seorang desainer yang telah menuangkan ide dan kreatifitasnya menjadi sebuah desain fashion yang di memiliki nilai ekonomi, sudah selayaknya mewajibkan orang lain untuk menghargai hasil karya nya serta tidak berbuat hal yang merugikan pihak desainer sebagai pencipta.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu

satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

Seorang desainer sebagai orang yang telah bersusah payah menuangkan ide dan kreatifitasnya dalam sebuah desain fashion wajar jika mendapat keuntungan dari segi ekonomi.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu pula timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

Berdasarkan prinsip ini pengakuan terhadap kreasi, ide serta hasil karya dari seorang desainer, akan membuat perasaan dihargai dan semangat menumbuhkan ide-ide kreatif lainnya dalam bentuk ciptaan-ciptaan desain yang baru.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, akan tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan prinsip ini, seorang desainer selaku pencipta diselaraskan dengan kepentingan masyarakat disekitarnya. Sehingga karya-karya nya diakui masyarakat serta oleh negara.

Ruang lingkup perlindungan desain sangat luas, sehingga banyak bersinggungan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, hak paten dan hak merek. Kondisi tersebut menyebabkan peraturan mengenai desain khususnya desain fashion banyak berkaitan dengan ketentuan hak atas kekayaan intelektual lainnya.

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka diperoleh simpulan:

1. Desain fashion merupakan objek yang dilindungi pada Peraturan Perundang-undangan HKI Indonesia, khususnya pada Hak Cipta dan Desain Industri. Perlindungan desain fashion dibawah Hak Cipta harus memenuhi

unsur-unsur diantaranya merupakan kreativitas dalam bentuk seni dan tidak diproduksi massal, sedangkan untuk desain fashion dibawah perlindungan Desain Industri harus memenuhi unsur-unsur diantaranya sebuah desain yang baru , diproduksi secara massal dan didaftarkan sebagai Desain Industri.

2. Fungsi perlindungan desain fashion antara lain menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan individu dengan kepentingan masyarakat.

B. SARAN

Dari pembahasan penulisan tesis ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlindungan desain fashion harus disertai dengan kesadaran yang tinggi dari pihak desainer sebagai pencipta desain dalam mendaftarkan hasil karya nya agar tidak di tiru oleh pihak lain yang dapat merugikan pihak desainer. Sikap melindungi hasil karya nya perlu dimiliki oleh seorang desainer mengingat banyaknya pelanggaran HKI di bidang fashion.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak menjiplak hasil karya orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui sosialisasi atau pengenalan lebih luas tentang pentingnya perlindungan HKI pada sebuah hasil karya desain. serta adanya langkah-langkah pencegahan atau antisipasi dari pihak yang berwenang dalam menyikapi maraknya penjiplakan.

DAFTAR PUSTAKA

Johanes Ibrahim dan lindawati Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*,
(Bandung, Rafika aditama :2003)

Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian hukum*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group,2005)

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (cetakan pertama,
binacipta bandung, 1982)

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

<http://arifh.blogdetik.com/industri-kreatif/>